

Problematika dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi

Muhammad Husaini¹ Khojir² Achmad Ruslan Afandi³

¹Fakultas Tarbiyah/PAI/UINSI Samarinda

^{2,3}Dosen Fakultas Tarbiyah/PAI/UINSI Samarinda

Email: kampungrajamapan@gmail.com khojir1971@gmail.com
achmadruslan@uinsi.ac.id

Abstrak

Pembahasan dalam artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar yang salah satunya akan diterapkan di perguruan tinggi. Secara spesifik, akan mengungkap berbagai permasalahan dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau pustaka yang pengumpulan datanya diperoleh dari berbagai literatur yang sesuai, baik dalam bentuk teks tertulis maupun soft copy. Melalui studi pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar mencakup pemberian otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk membuka program studi baru asalkan universitas tersebut terakreditasi A atau B dan telah menjalin kerjasama dengan organisasi atau perguruan tinggi yang masuk dalam QS top 100 perguruan tinggi dunia; Sistem re-akreditasi perguruan tinggi bersifat otomatis untuk semua jajaran kecuali PT dan program studi yang akan dipromosikan; kebebasan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH); dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Permasalahan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi adalah a) mekanisme kerjasama antara perguruan tinggi dan program studi dengan pihak-pihak di luar kampus; b) perubahan paradigma PTN dengan badan hukum untuk bersaing dalam skala internasional; c) mekanisme magang di luar program studi.

Kata kunci: *Problematik, Implementasi, Kurikulum Merdeka Belajar*

Abstract

The discussion in this article is motivated by the existence of an Independent Learning Curriculum (Kurikulum Merdeka Belajar) policy, one of which will be implemented in universities. Specifically, it will reveal various problems in the implementation of the Independent Learning Curriculum in universities. The method used in this study is a literature review or library in which data collection is obtained from various appropriate literature, both in the form of written text and soft copy. Through a literature study that has been carried out by the author, it can be seen that the Independent Learning Curriculum policy includes the provision of autonomy for State University (PTN) or Private University (PTS) to open new study programs provided that the university is accredited A or B and has collaborated with organizations or universities that are included in the QS top 100 world Universities; higher education re-accreditation system is automatic for all ranks except for PT and study programs that will be promoted; freedom to become a State University with Legal Entity (PTN-BH); and the right to study three semesters outside

the study program. The problems of implementing the Independent Learning Curriculum in Higher Education are a) the mechanism of collaboration between universities and study programs with parties outside the campus; b) paradigm shift in PTN with legal entities to compete on an international scale; c) internship mechanism outside the study program.

Keywords: *Problematics, Implementation, Independent Learning Curriculum*

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan di dunia modern berkembang sangat pesat, dengan berbagai tantangan yang sangat serius dihadirkan kepada dunia. Perkembangan dunia global di era 4.0 berdampak pada semua bidang kehidupan manusia, kecuali pendidikan.(Hidayat, 2019).Fase ini ditandai dengan ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan. Era 4.0 melahirkan Pendidikan 4.0. Konsep ini lahir dari kebutuhan akan keterampilan untuk mengubah tahun industri 4.0 sebagai wujud dari visi masa depan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Industri 4.0. Inovasi pendidikan di era 4.0 menampilkan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengembangan aspek pengetahuan, tetapi juga mengembangkan pemikiran sesuai dengan tantangan hidup dan meningkatkan kreativitas dan kreativitas inovasi dalam berbagai aspek kehidupan.(Rodiyah, 2021) Siti Mustaghfiroh menegaskan bahwa konsep kebijakan merdeka belajar tersebut relevan dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme John Dewey. Keduanya sama-sama menekankan adanya keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi semaksimal mungkin kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah agar memiliki kemampuan dan potensi yang beragam (Fatmi dkk 2021). Merdeka belajar merupakan tantangan bagi generasi millennial untuk menjadi manusia unggul dan berdaya saing global dengan memiliki kemampuan leadership, digital literacy, communication,emotional intelligence, enter preneurship, global citizenship, problem solving, dan team working.(Marjanis, 2021). Merdeka belajar sendiri memiliki esensi bahwa peserta didik nantinya akan memiliki kebebasan dalam berpikir baik secara individu ataupun kelompok, sehingga di masa mendatang dapat melahirkan peserta didik yang unggul, kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, serta partisipasi. Harapannya dengan adanya program merdeka belajar akan ada keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran akan semakin meningkat (Aan Widiyono, dkk 2021)

Implementasi kebijakan merdeka belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, dalam merdeka belajar guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. dengan kompetensi-kompetensi tersebut guru dapat mewujudkan pelaksanaan dan tujuan implementasi kebijakan merdeka belajar (Agustinus Tanggu Daga 2021). kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 akan dihadapkan pada tantangan yang lebih rumit. Oleh karena itu, kurikulum harus didefinisikan sebagai the evolution document atau dokumen yang terus berubah. Sebagai contoh, mata kuliah boleh sama tetapi isi kurikulum harus terus disempurnakan, kompetensi seseorang adalah kemampuan 20 Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar yang digambarkan sebagai kemampuan beradaptasi, kemampuan beradaptasi adalah pembelajar sepanjang hayat(Suryaman, 2020). Merdeka Belajar perlu memperhatikan aspek Keadilan & Mutu Pendidikan sebagai Dua Bilah Mata Uang.Merdeka Belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menanamkan Lifelong Learning Capacity (LLC) sebagai Tema Sentral Revolusi Industri Ke-4. Merdeka Belajar terkait dengan upaya sekolah dalam menanamkan Lifelong Learning Capacity (LLC) sebagai Tema Sentral Revolusi Industri Ke-4.1).(Fajarika

. Ramadania, dkk 2020).

Salah satu tantangan dalam proses pendidikan yang dihadapi perguruan tinggi adalah pengembangan kurikulum di era Industri 4.0. Perlu dikembangkan lulusan dengan keterampilan literasi baru seperti literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Dikenal luas sebagai Kampus Belajar Merdeka, kebijakan ini bertujuan untuk memungkinkan proses pembelajaran yang mandiri dan fleksibel di pendidikan tinggi dan untuk menciptakan budaya belajar yang inovatif dan tidak terbatas yang memenuhi kebutuhan siswa. Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian (Seminar et al., 2020). Dorong siswa untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu yang akan membantu mereka menemukan pekerjaan dan memberi mereka kemampuan untuk memutuskan kursus mana yang akan diambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koneksi dan respon antara dunia usaha dan industri serta mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja sejak awal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan Tugas Mata Pelajaran (SKS) di luar program studi, baik di lingkungan Perguruan Tinggi (PT), di luar PT, dan/atau di luar PT. Artinya siswa dapat mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat di dunia kerja. Kebijakan ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk melakukan proses pembelajaran yang inovatif agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal dan menghasilkan siswa yang berkembang di bidangnya masing-masing (PT). Mempengaruhi munculnya tuntutan (Hr, 2020). Untuk memenuhi tuntutan, perubahan, dan kebutuhan yang berhubungan dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) serta mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja, pendidikan tinggi merupakan proses pembelajaran inovatif yang membantu mahasiswa belajar secara optimal. Pencapaian hasil belajar, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (Suryaman, 2020) Tantangan yang harus dihadapi perguruan tinggi ke depan, seperti menciptakan kurikulum pembelajaran mandiri dan kampus penelitian dengan program gelar terkait KKNi, bukanlah tugas yang mudah. Tim redaksi kursus yang baru saja menyelesaikan dan mengimplementasikan kurikulum KKNi I kemudian menata ulang kurikulum pembelajaran mandiri dan kampus mandiri, harus menghadapi banyak kesulitan. Secara teoritis mudah dan pasti untuk mengundang ahli kurikulum dan mencoba membuatnya, tetapi kenyataannya semudah dan tidak pasti seperti membalikkan telapak tangan. Selain itu, kurikulum KKNi belum dievaluasi secara rinci dan mendalam oleh pihak kursus, karena kekuatan dan kelemahannya tidak diketahui secara pasti, tetapi telah diterapkan di kursus sejak lama. Karena jumlah sks yang banyak, maka perlu dilakukan penyesuaian jumlah sks yang berjumlah 20 atau lebih dengan hati-hati. Selain itu, dikhawatirkan isi program kurikulum pembelajaran mandiri dan pembelajaran kampus yang mengutamakan praktik lapangan (link and match) dapat melupakan atau membatalkan tujuan utama pendidikan. (Susetyo, 2020) Kebijakan ini sangat kental dalam pendekatan pasar untuk kebutuhan industri, ketimbang memiliki kepribadian yang luhur, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk kepribadian siswa yang cinta tanah air. Dikhawatirkan pula pendidikan tinggi hanya akan menghasilkan orang-orang yang bekerja, bukan pemikir kritis. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kesiapan SDM perguruan tinggi dalam menerapkan kurikulum berbasis pembelajaran mandiri? Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar dan berbagai permasalahan yang akan muncul dalam implementasi kurikulum pembelajaran mandiri di perguruan tinggi.

METODE

Penulisan artikel ini merupakan tinjauan pustaka, dan datanya bersifat deskriptif dan merupakan kajian akademis yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pokok bahasan risalah ini berkaitan dengan masalah penerapan kurikulum pembelajaran mandiri di perguruan tinggi. Pengumpulan data berita acara ini diawali dengan pengumpulan berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk teks tertulis maupun dalam format soft copy. B. Buku teks, artikel ilmiah, ebook, dll. Kedua jenis literatur tersebut merupakan sumber informasi utama untuk penjelasan variabel-variabel dalam risalah ini. Penulis kemudian menganalisis data tersebut, mereduksi berbagai informasi yang relevan, dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi data dan memilih informasi yang dikumpulkan setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dalam bentuk teks maupun soft copy. Penulis juga mencoba mempelajari dan memahami berbagai data terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam artikel ini. Menurut Creswell(Hr, 2020). jenis teknik akuisisi dan analisis data ini disebut sebagai sarana triangulasi menggabungkan, mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang ada.

PEMBAHASAN

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI).Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Indonesia Maju. Sebelum mengajarkannya kepada guru dan siswa. Nadiem mengatakan bahwa pembelajaran tidak akan pernah terjadi tanpa kemampuan guru di semua tingkatan dan proses penerjemahan dari keterampilan dasar dan kurikulum yang ada. Konsep pendidikan “merdeka belajar” memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa. Artinya, mahasiswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan mahasiswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah.(Widodo, 2021).Implementasi kebijakan merdeka belajar apabila memperhatikan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dapat diawali dengan aspek pribadi guru dan dosen.(Nanda Alfian Kurniawan)

Tahun depan, sistem pendidikan juga akan diubah dari sistem lancar di dalam kelas menjadi sistem di luar sekolah. Siswa tidak hanya lebih banyak berbicara dengan guru, studi banding dan mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berani, mandiri, bersosialisasi, arif, beradab, santun dan kompeten. , Lingkungan belajar akan lebih nyaman, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan di bidangnya masing-masing, jadi jangan mengandalkan sistem peringkat yang hanya peduli pada anak dan orang tua. Setelah itu, siswa yang berakhlak mulia, bercita-cita dan berbakat dibina di masyarakat (Widya, 2020).

Tabel 1. Gebrakan Merdeka Belajar

Konsep Belajar Merdeka	
Pelaksanaan USBN tahun 2020 akan dikembalikan ke sekolah	Motto yang terkenal : "Merdeka belajar, Guru Penggerak"
Pada tahun 2021, Nadiem berencana menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.	
Membentuk mahasiswa SDM yang kompeten dan cerdas bangsa, dan berbudi luhur.	

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar

Konsep belajar gratis Nadiem Makarim dilatarbelakangi oleh keinginannya

untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa membebani dirinya dengan pencapaian nilai dan nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disampaikan dalam paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Direksi Biro Pendidikan di negara bagian, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 11 Desember 2019. Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. (Rodiyah, 2021) Salah satu pendekatan yang dianut oleh Nadiem Makarim adalah pendekatan progresivisme yang dipopulerkan oleh John Dewey. Pendekatan progresivisme menekankan pada potensi manusia untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menolak model pendidikan otoriter yang membatasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. (Arifin et al., 2021). Nadiem punya kebijakan belajar mandiri, bukan tanpa alasan. Survei Program for International Student Assessment (PISA) 2019 menemukan bahwa siswa Indonesia berada di peringkat keenam dari bawah. Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara dalam hal matematika dan literasi. Menyikapi hal tersebut, Nadiem juga melakukan terobosan dalam menilai kemampuan minimal, antara lain literasi, numerasi, dan kurva karakter. Literasi tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan dan memahami konsep di baliknya. Untuk keterampilan berhitung yang dinilai bukanlah matematika, melainkan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

Pada konteks manusia merdeka, Ki Hadjar Dewantara, telah membangun pola pendidikan untuk proses learning yang outputnya adalah menjadi manusia seutuhnya dengan mengembangkan dan mempelajari secara serius tentang kehidupan (makrokosmos dan mikrokosmos) untuk sepanjang hidup. Disinilah manusia pembelajar perlu diberikan bekal berupa dua macam kemampuan, yaitu: Pertama, kemampuan menyesuaikan diri dengan angin perubahan. Pada tahap ini memerlukan daya kreatif. Kreatifitas akan mampu membawa manusia terus maju di era yang sudah berubah. Era revolusi industri 4.0 juga sangat membutuhkan kreativitas. Kedua, mampu memiliki akar yang kuat agar kokoh serta tidak mudah roboh (Natalia & Sukraini, 2021)

Implikasi Kurikulum Merdeka Belajar bagi Perguruan Tinggi

Kebijakan pemerintah memberikan otonomi bagi lembaga pendidikan, menghilangkan birokrat yang kompleks, dan memberikan kebebasan yang luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi yang diinginkan (Dirjen Dikti, Kemendikbud, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020). Kebijakan ini memiliki harapan besar untuk mewujudkan iklim budaya kampus yang mandiri, birokrasi yang tidak berbelit-belit dan pengembangan sistem proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan modern. Harapan besar ini akan bermuara pada percepatan dan peningkatan kualitas akademik di semua perguruan tinggi. Setidaknya ada empat program besar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) yang disoroti dalam buku ini: Pembukaan Program Studi Baru. Sangat mudah bagi perguruan tinggi, PTN dan PTS untuk membuat program penelitian baru yang terbuka untuk memenuhi kebutuhan daerah, sehingga pemerintah dapat memenuhi tuntutan daerah dalam rangka percepatan pembangunan birokrasi dan pembelajaran yang tidak berbelit-belit. Publikasikan kebijakan universitas, dapatkan pekerjaan di industri dan di seluruh dunia. Harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi kemungkinan kredit penelitian yang belum terserap ke dunia kerja, karena berpotensi menambah jumlah pengangguran. Mata kuliah yang memenuhi persyaratan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Perubahan, dan

.Pembubaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Izin Pasal 24 Ayat 2 Tentang Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dengan sendirinya diakui "baik". . Akan diterima. Itu tergantung pada badan akreditasi nasional. (Kemendikbud RI belum ada tanggalnya) Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Program akreditasi merupakan salah satu alat ukur standarisasi mutu pendidikan tinggi dan program sarjana. Adanya akreditasi ini secara tidak langsung mengamanatkan perguruan tinggi dan program gelar untuk secara terus menerus dan struktural mengembangkan kualitasnya, terutama untuk tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat). Sistem akreditasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan program keliling untuk melihat kemajuan dalam pengembangan kualitas perguruan tinggi dan lembaga penelitian (Presiden Republik Indonesia, no date). Saat ini, perpanjangan akreditasi lima tahun menjadi beban yang memberatkan, sehingga mengurus seluruh sumber daya yang ada di universitas. Hal ini justru kontra produktif karena sumber daya yang ada terpaksa harus menyiapkan perangkat akreditasi dan dokumen fisik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mendobrak pola akreditasi saat ini bahwa program gelar yang baru didirikan secara otomatis menerima akreditasi C yang "cukup" sampai PT atau program gelar mengajukan sertifikasi ulang. Kursus baru ini memberikan pernyataan bahwa secara otomatis akan menerima akreditasi BAN PTC tanpa menunggu persetujuan dari kementerian. Mata kuliah ini merupakan penyempurnaan atau re-sertifikasi berdasarkan Permendikbud No. 5/2020 untuk mata kuliah dan sertifikasi perguruan tinggi, dan sertifikasi berlaku sejak awal hingga aplikasi. (Mendikbud, OlahRaga, Iptek RI, No Date) Perguruan tinggi baru dan program gelar yang telah terakreditasi "C" dengan persetujuan Menteri akan ditingkatkan menjadi "B" baik untuk perguruan tinggi maupun program gelar terakreditasi. harus menunggu dua tahun setelah pemberitahuan dikeluarkan. Dua tahun terakhir telah mengkhawatirkan masalah penerimaan siswa baru ke perguruan tinggi dan kursus, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut. Kebijakan lain Nadiem Makarim yang sangat menggembirakan penulis adalah perguruan tinggi dan program studi yang telah memperoleh akreditasi bermutu tinggi dari badan akreditasi internasional yang diakui Kementerian akan otomatis mendapat akreditasi A. Badan akreditasi internasional yang diakui pemerintah termasuk EQAR, CHEA, USDE, Washington Accor, Sydney Accord, dan WFME (Andi Tenri Dio Nasrun, nd). Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Kebijakan "Kemandirian Akademik" ketiga Nadiem bertujuan untuk mempermudah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) non-korporasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Berita Kumparan, n.d.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyederhanakan persyaratan pengelolaan dan membantu PTN mengubah statusnya menjadi badan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong PTN untuk lebih mengembangkan potensinya. Sebuah. Hak Belajar Mahasiswa 3 Semester Di Luar Program Studi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada mahasiswa untuk memperoleh Satuan Kredit Semester (SKS) di dalam dan di luar kampus serta program di luar program gelar. Kebijakan ini telah dievaluasi oleh berbagai kalangan karena dirasa tepat untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mata kuliah yang mereka inginkan Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi untuk memberikan satu mengurangi kebebasan untuk mendapatkan satu semester atau 20 sks di luar kampus dan dua semester atau 40 sks di luar kampus. (Pendidikan et al., 2020)

Suatu program pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam setiap proses pengimplementasiannya. Kelebihan merdeka belajar kampus merdeka: (1) Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, yang artinya melepas belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak; (2) Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan; (3) Memberikan wadah untuk para mahasiswa mengeksplor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat; (4)

Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan. Kemudian, kekurangan merdeka belajar kampus merdeka yakni: (1) Persiapan yang dilakukan dirasa kurang matang; (2) Perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik; (3) SDM yang ada dirasa kurang kuat dalam menjalankan program merdeka belajar kampus merdeka (Naily Maghfiroh dkk, 2022). Dalam studi survei kuantitatif yang dilakukan, diperoleh temuan sebagian besar mahasiswa menilai MBKM dapat memberikan kompetensi tambahan buat mereka. Namun tidak sedikit pula mahasiswa yang meragukan MBKM dapat memberikan kompetensi tambahan bagi mereka. Selain itu, mahasiswa juga beranggapan, peningkatan kompetensi tergantung dari mitra yang mendampinginya.(Husen Mony, dkk 2021)

Problematika Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

- a. Sebuah Mekanisme Kerjasama Perguruan Tinggi Islam dan Program Studi dengan Pihak Luar Kebijakan pembukaan program penelitian (prodi) baru, akreditasi perguruan tinggi, dan program penelitian merupakan dua visi Mendikbud, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kebijakan ini membawa angin segar bagi para birokrat dan perdebatan sengit tentang penerapan gelar baru dan persyaratan akreditasi.
- b. Sistem pembelajaran yang digunakan saat ini melalui LMS (Learning Management System) untuk menunjang kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Sistem ini mengakomodir segala bentuk kegiatan pembelajaran diantaranya presensi kehadiran, materi, tugas, ujian, nilai, dan lain sebagainya. Dengan tersentralisasi sistem pembelajaran di server perguruan tinggi yang mengakibatkan permasalahan baru terkait kemampuan server dalam menangani sistem pembelajaran tersebut. Hal ini menjadi peluang di FTS tepatnya di Program Studi Informatika, bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan yaitu melakukan kegiatan riset dan studi proyek mandiri terkait dengan kemampuan server baik jaringan, keamanan, dan internet.(. Sistem pembelajaran yang digunakan saat ini melalui LMS (Learning Management System) untuk menunjang kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Sistem ini mengakomodir segala bentuk kegiatan pembelajaran diantaranya presensi kehadiran, materi, tugas, ujian, nilai, dan lain sebagainya. Dengan tersentralisasi sistem pembelajaran di server perguruan tinggi yang mengakibatkan permasalahan baru terkait kemampuan server dalam menangani sistem pembelajaran tersebut. Hal ini menjadi peluang di FTS tepatnya di Program Studi Informatika, bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan yaitu melakukan kegiatan riset dan studi proyek mandiri terkait dengan kemampuan server baik jaringan, keamanan, dan internet.(Sahid Agustian Hudjimartu dkk(2021)
Pada tataran praktis, salah satu syaratnya adalah perguruan tinggi dan program sarjana perlu mengcajaukan mekanisme dan bekerjasama dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, pemerintah dan swasta). Untuk angkutan umum besar, ini bukan masalah besar, tetapi untuk angkutan umum kecil, kewajiban ini menimbulkan masalah tersendiri.
- c. Beberapa pertanyaan muncul di antara PT kecil atau PT yang termasuk dalam

- kategori tertinggal, terluar, dan terpencil, 1) bagaimana PT bekerja sama dengan perusahaan jasa dan industri besar?, 2) Apakah PT dan PTN besar ingin bekerjasama dengan PT kecil atau PT dengan akreditasi A bekerjasama dengan perguruan tinggi yang hanya memiliki akreditasi B atau bahkan C?. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari solusi dan regulasi mekanisme kerjasama yang dapat mempermudah PT kecil menjalin kerjasama dengan instansi dan PT besar. Perguruan tinggi kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan terutama perguruan tinggi dengan letak geografis yang terpencil tentu memiliki hambatan besar untuk menjalin kerjasama dengan instansi besar dan perguruan tinggi terkemuka untuk mewujudkan kerjasama yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa mekanisme yang jelas dan kesamaan visi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dianggap hanya baik dari segi aturan tetapi menimbulkan masalah pada tataran praktis.
- B. Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan Kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH) Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk menciptakan perguruan tinggi yang siap bersaing secara internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya dirasa sangat kaku dan berat, diantaranya PTN harus mendapatkan akreditasi A sebelum bisa menjadi PTN-BH, sebagian besar program studi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH. menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker memiliki fleksibilitas keuangan, kurikulum dan kebijakan yang kurang dari PTN-BH. Dalam kebijakan "kuliah gratis, kampus mandiri" ini, Nadiem memangkas birokrasi dan persyaratan yang berbelit-belit, tidak ada batasan minimal akreditasi, dan keleluasaan dalam mengajukan PTN-BH selama PTN tersebut merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk status pindah. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN menjadi world class university. Saat ini baru ada 8 PTN yang masuk dalam 1000 kampus internasional terbaik (8 PTN yang masuk dalam peringkat 1000 Terbaik Dunia, n.d.). Melihat kenyataan ini, pemerintah harus berani mematok target tinggi bagi PTN dengan birokrasi yang mudah dan pasokan anggaran yang cukup untuk go internasional, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.
- d. Mekanisme Magang Di Luar Program Studi Kebijakan magang selama 3 semester di luar program studi dan PT merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja.(Faiz, 2021) Pada tataran praktis, muncul beberapa permasalahan bagi PT kecil atau PT yang letak geografisnya terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kerjasama antara program studi dengan universitas dan program studi besar (mengacu pada tingkat akreditasi) serta institusi besar sesuai poin 2 di atas, muncul pertanyaan antara program studi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaannya. untuk kegiatan magang. Sebagian besar universitas dan program studi dengan kategori di atas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah ke bawah, pembiayaan magang menjadi masalah besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya untuk menunjang kegiatan lainnya karena dirasa tepat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pengalaman pada mata pelajaran yang mereka inginkan.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud RI) Republik Indonesia. Sebelum mengajarkannya kepada guru dan siswa. Nadiem mengatakan bahwa pembelajaran tidak akan pernah terjadi tanpa kemampuan guru di semua tingkatan dan proses penerjemahan dari keterampilan dasar dan kurikulum yang ada. sistem pendidikan juga akan diubah dari sistem lancar

di dalam kelas menjadi sistem di luar sekolah. Siswa tidak hanya lebih banyak berbicara dengan guru, studi banding dan mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berani, mandiri, bersosialisasi, arif, beradab, santun dan kompeten., Lingkungan belajar akan lebih nyaman, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan di bidangnya masing-masing, jadi jangan mengandalkan sistem peringkat yang hanya peduli pada anak dan orang tua. Setelah itu, siswa yang berakhlak mulia, bercita-cita dan berbakat dibina di masyarakat; 2) Kebijakan visioner Kurikulum Pembelajaran Mandiri di Perguruan Tinggi (PT) yang dicanangkan Mendikbud antara lain: pembukaan program studi baru; sistem akreditasi perguruan tinggi; kebebasan menjadi PTN-BH dan hak belajar selama tiga semester di luar program studi, memberikan harapan besar bagi seluruh perguruan tinggi untuk mempercepat pengembangan kualitas akademik masing-masing perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang sudah maju maupun perguruan tinggi yang masih dalam tahap pengembangan; 3) Permasalahan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi adalah a) mekanisme kerjasama antara PT KIS dan program studi dengan pihak di luar kampus; b) perubahan paradigma PTN dengan badan hukum untuk bersaing dalam skala internasional; c) mekanisme magang di luar program studi. Strategi yang perlu dilakukan agar kebijakan ini efektif, produktif dan efisien, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan saran, masukan dari berbagai kalangan, dan dengan latar belakang non-pendidikan dari Menteri, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang karakteristik pendidikan di Indonesia, permasalahan pendidikan di Indonesia. era sebelumnya, dan kondisi geografis PT yang berbeda untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan lebih lanjut yang mengoreksi beberapa kekurangan dari 4 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dirumuskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Abidin, N., & Anshori, F. Al. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam7(1), 65–78.
- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Mandiri Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19
- Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Karya Tulis Ilmiah Menuju Anak Bebas Belajar”, 68– 74.
- Faiz, A. (2021). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. 3(3), 649–655.
- Hidayat, N. (2019). Urgensi Pendidikan Islam Di Era 4 . 0. May, 0–15.
- Hr, S. (2020). Manifestasi hidden curriculum dalam pendidikan agama islam. 19(1), 947–954.
- HR, S. (2020a). Kurikulum Tersembunyi Pendidikan Islam di AL- Qur’an Surah Lukman. Didaktik, Jurnal Pendidikan, 14, 99-115. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2rz-NDoAAAAJ&citation_for_view=2rz-NDoAAAAJ:9yK
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Natalia, K., & Sukraini, N. W. (2021). Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, No. 3 Tahun 2021 22. 3, 22–34.
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. 7(2), 425–434.
- Seminar, P., Biotik, N., Fuadi, T. M., Tinggi, P., & Biologi, P. (2020). No Title. 3, 183–

200.

- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.(n.d.). Rekapitulasi Data Utama Pendidikan Islam. Diakses tanggal 7 April 2020, dari <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-ptki>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. 13–28.
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Mandiri untuk Pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra, 1(1), 29–43.
- Tan, S. Y., Al-Jumeily, D., Mustafina, J., Hussain, A., Broderick, A., & Forsyth, H. (2018). Memikirkan Kembali Pendidikan Kita Untuk Menghadapi Era Industri Baru. *Edulearn 18 Prosiding*, 1 (Juli), 6562–6571. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1564>
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2020). jdih.kemdikbud.go.id. Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-republik-indonesia-number-12-year-2012-about-tinggi-education>
- Widodo, B. (2021). Implementasi Education 4 . 0 dan Merdeka Belajar dalam Matematika di Perguruan Tinggi. 4, 910–916.
- Widya Ningsih,. 2020. "Kebebasan Belajar Melalui Empat Pokok Kebijakan Baru Dalam Pendidikan | Suara Guru Online" (Bahasa Inggris). Diakses pada 11-11-16